

Wacana Komunikasi Politik Bagi Politisi Dalam Mempertahankan Eksistensinya Melalui Perspektif Forensik Komunikasi

Fidya Faza Faraid ^{1*}, Ibnu Hamad ², Yunita Sari ³

^{1,3}Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

²Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*fidyafaraid@gmail.com

Artikel

Submitted: 29-10-2023

Reviewed: 11-11-2023

Accepted: 21-12-2023

Published: 30-12-2023

DOI:

10.32509/wacana.v22i2.3523



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Volume : 22

No. : 2

Bulan : Desember

Tahun : 2023

Halaman : 380-391

Abstract

This research aims to analyze the political communication discourse of the politician "Fahri Hamzah" in maintaining his existence. The paradigm used in this research is the constructivist paradigm. Using a qualitative approach, Teun Van Dijk's communication forensic discourse analysis method. The subject of this research is Fahri Hamzah as deputy general chairman of the Gelora party. The object of his research is his political statements. The data used in this research uses two types of data sources, namely primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, questionnaires, documentation and a combination of the four. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data display and data conclusion. The data validity technique uses source triangulation. Meanwhile, the theories used in this research are discourse analysis theory, forensic communication theory and social construction theory. Based on the research results, a conclusion was obtained about Fahri Hamzah's political discourse which is Philosophische Grondslag as a reference for politics. The characteristics of political communication are carried out up and down as well as vertically and horizontally. Fahri Hamzah manages politics with minimal motives of science-based pragmatism. In the future, with a consistent political tone, Fahri Hamzah can maintain his existence thereby providing many very good and positive political lessons for the people.

Keywords : Political discourse, Politician, Communication Forensics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana komunikasi politik dari tokoh politisi "Fahri Hamzah" dalam mempertahankan eksistensinya. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis wacana forensik komunikasi Teun Van Dijk. Subjek penelitian ini adalah Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum partai Gelora. Objek penelitiannya adalah pernyataan-pernyataan politiknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan skunder. teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan, reduksi data, display data dan konklusi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis wacana, teori komunikasi forensik dan teori konstruksi sosial. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan wacana politik Fahri Hamzah yang merupakan *Philosophische Grondslag* sebagai acuan berpolitik. Karakteristik komunikasi politik dilakukan secara up dan down juga vertical dan horizontal. Fahri Hamzah mengelola politik dengan minim motif pragmatisme berbasis ilmu pengetahuan kedepannya dengan tone politik yang konsisten maka, Fahri Hamzah dapat mempertahankan eksistensinya sehingga memberikan banyak pelajaran politik yang sangat baik dan positif bagi rakyat.

Kata Kunci : Wacana politik, Politisi, Forensik Komunikasi

PENDAHULUAN

Dewasa ini pilihan masyarakat terhadap partai politik tidak hanya ditentukan oleh kebesaran suatu partai, atau nama besar politisi yang mungkin sebelumnya di rekrut dari berbagai bidang yang memberikan nama besar didalamnya namun, masyarakat juga akan lebih menilai kepada citra positif partai tersebut, eksistensi partai politik juga akan ditentukan dengan hubungan yang terus dibangun dengan masyarakat, sehingga kedekatan tersebut akan menumbuhkan kepercayaan konstituen. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai politik akan terbentuk manakala partai tersebut memiliki kemauan dan konsisten dalam menyuarakan aspirasi konstituen, yaitu membela kepentingan-kepentingan dasar dan kebutuhan dasar masyarakat. Bila upaya-upaya itu terus dilakukan, maka simpatisan akan terus mengalir juga mendapatkan bonus *electoral vote* dan tentu saja citra suatu partai politik akan meningkat (Susanto, 2017).

Komunikasi politik salah satu tujuannya adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Juga dewasa ini media yang dilakukan semakin luas sehingga para politisi dapat membangun citra politik berkaitan juga dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik (Rahmi, 2019).

Citra politik akan selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan dan pengalaman politik seseorang, serta situasi politik yang selalu berkembang. Sosialisasi politik terbangun melalui proses belajar secara terus-menerus, melalui pengalaman sosialisasi politik, seseorang mengembangkan kepercayaan dan harapan sesuai dengan cita-cita politik yang relevan. Sosialisasi politik dapat mendorong terbentuknya citra politik pada individu, sehingga dapat mendorong seseorang melakukan peran-peran partisipasi politik seperti, kampanye, pemilu, kegiatan partai ataupun diskusi politik (Prastowo, 2020).

Wacana komunikasi politik dalam kajian ini mengambil kasus pada peristiwa komunikasi politik yang dilakukan Fahri Hamzah sebagai anggota DPR-RI dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dibawah kepemimpinan Anies Matta sebagai ketua umum partai. Partai Gelora sedang semangat-semangatnya untuk memperlihatkan eksistensinya dan membentuk citra sebagai partai baru dan reformis yang setara dengan partai lainnya.

Berkaitan dengan bahasan tentang wacana komunikasi politik, Yulmi Hartinah, Filia Maya Kindi, "Analisis Wacana Politik Capres Joko Widodo Dan Prabowo Subianto Dalam Debat Pilpres 2019". Penggunaan diksi dalam debat pilpres 2019 berdasarkan ketepatan hasil pilihan kata atau diksi yang ditemukan, yaitu pemakaian kata penginderaan, pemakaian kata khusus, pemakaian kata istilah asing, pemakaian kata antonim atau lawan kata, pemakaian kata sinonim atau persamaan kata pemakaian diksi kedaerahan, diksi konotatif, dan diksi konkret. Penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam debat pilpres 2019 adalah gaya bahasa yang berdasarkan persamaan makna berupa pleonasmе dan repetisi, berdasarkan oposisi makna berupa majas paradoks, dan penggunaan gaya bahasa penegasan pertentangan berupa antithesis. Kemudian penggunaan gaya bahasa yang lebih dominan dalam pelaksanaan debat pilpres 2019 adalah pemakaian gaya bahasa sindiran berupa ironi dan sinisme dan gaya bahasa perbandingan berupa asosiasi, perumpamaan dan litotes. (Hartinah & Kindi, 2020).

Penelitian selanjutnya yang ke dua yaitu "Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden Dan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia." komunikasi dalam debat senantiasa penuh dengan argumen dan pernyataan. Salah satu dari kelemahan yang nampak dalam penampilan debat Pilpres ini juga terletak pada kelemahan membuat pernyataan dan ketika sedang berargumen. Dilihat dari analisis diatas bahwa ada 3 hal yang mendasar yang kurang dan belum muncul dalam pengelolaan argumen dalam debat Pilpres 2019 diantaranya adalah sedikitnya pernyataan argument yang kuat serta kurang mampunya memberikan bukti pada setiap argumen yang dikemukakan dan kurangnya memanfaatkan waktu dalam debat untuk mengelola pesan politik yang diusung (Iskandar, 2020).

Berdasarkan beberapa literatur penelitian sebelumnya sama konteks pada wacana komunikasi politik, namun belum ada yang menganalisis dari perspektif forensik komunikasi Motley dalam (Prajarto, 2010) mengisyaratkan ilmu komunikasi tidak hanya digunakan sebagai metode dalam pembuktian di dalam persidangan, namun lebih luas lagi, metode dan ilmu komunikasi digunakan sebagai konsultan bagi jaksa penuntut ataupun pengacara. Secara utuh forensik memang diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (*expert witness*) dari disiplin ilmu tertentu. Sebagai gejala yang positif, setiap upaya komunikasi dan setiap proses penyampaian pesan adalah memiliki material yang juga dapat dikaji sebagaimana yang dikaji oleh cabang-cabang forensik yang terdahulu. S. Kunto Adi Wibowo dalam (Jannatania et al., 2022), Komunikasi forensik merupakan bagian dari definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi (Hamad, 2004), komunikasi forensik, teknik analisis wacana untuk menemukan motif dan tujuannya.

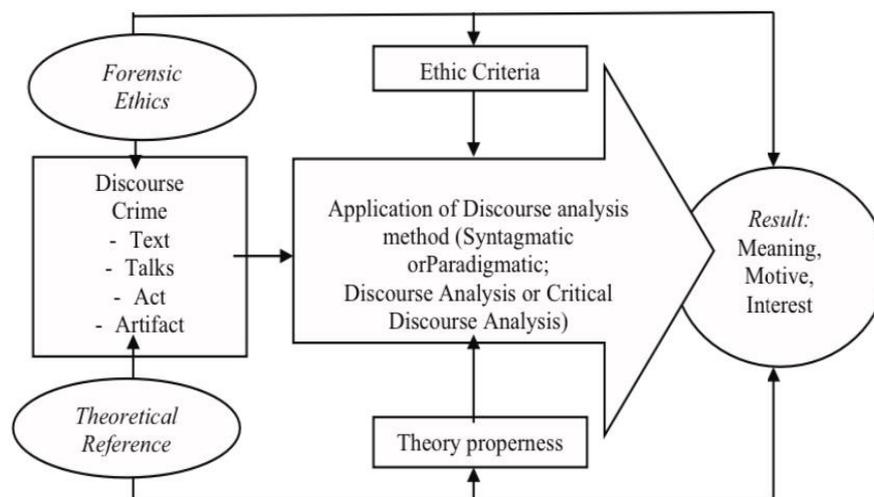
Merujuk pada fenomena tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari perspektif forensik komunikasi, tentang wacana komunikasi politik Fahri Hamzah untuk mempertahankan eksistensi dan citra partai baru yang dinamis dan modern serta memperkenalkan Gelora sebagai partai yang membawa arah baru bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana komunikasi politik dari tokoh politisi "Fahri Hamzah" dalam mempertahankan eksistensinya.

METODOLOGI

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan (Mulyana, 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Sugiono, 2013). Subjek penelitian ini adalah Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum partai Gelora. Objek penelitiannya adalah pernyataan-pernyataan politiknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data pertama adalah data primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan Fahri Hamzah. Kedua, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen

Selanjutnya Teknik pengumpulan data, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan, reduksi data, display data dan konklusi data (Mulyana, 2018). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis wacana, teori komunikasi forensik dan teori konstruksi sosial.

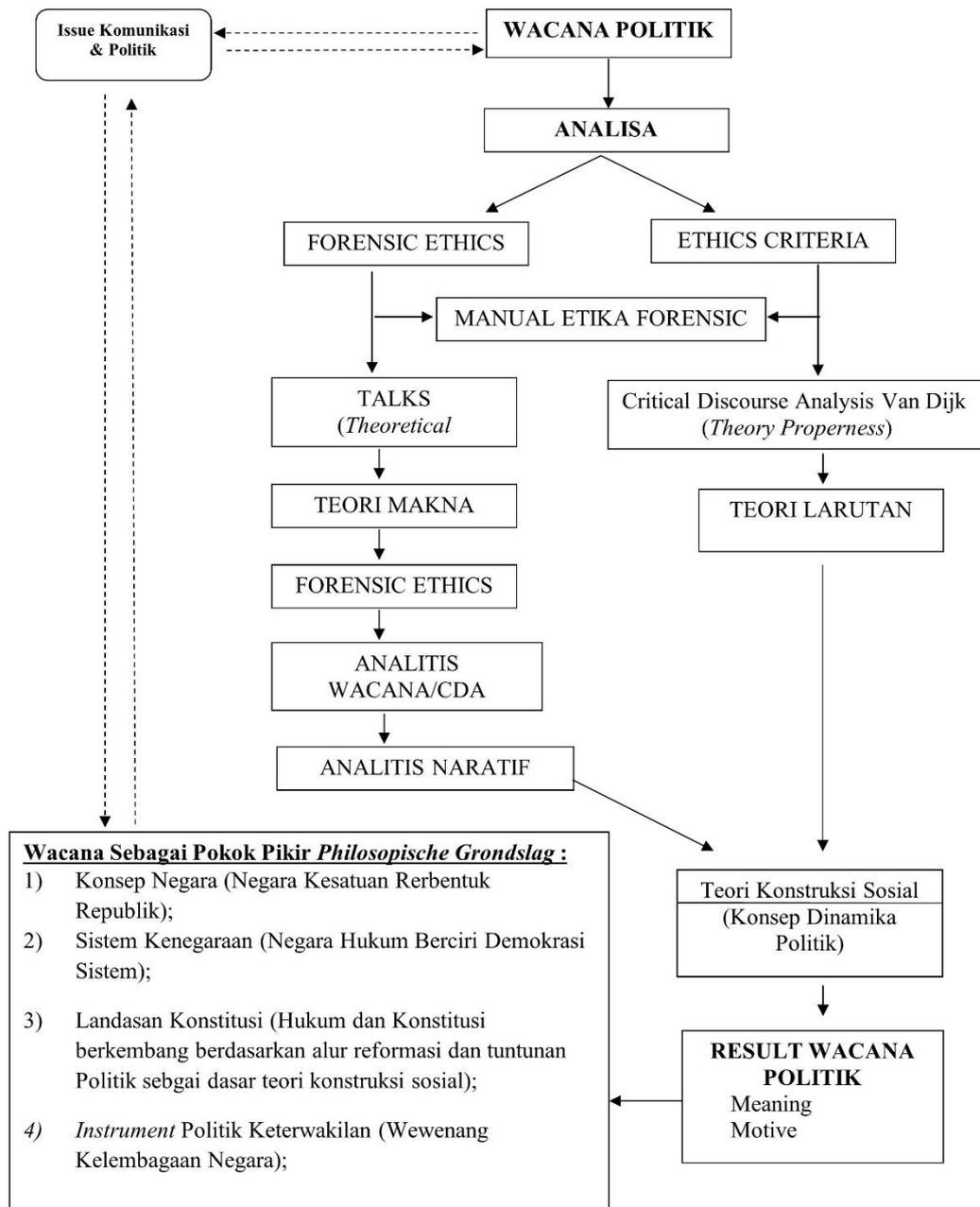
Analisis wacana untuk komunikasi forensik harus mengacu pada teori dan manual etika forensik untuk menjaga hasil analisis komunikasi forensik yang bias subjektif. Kedua, mendapatkan Wacana (huruf D) terkait dengan kejahatan yang sedang diselidiki dalam satu atau berbagai bentuk wacana. Ketiga, menerapkan satu atau lebih metode analisis wacana untuk menafsirkan Wacana (huruf D). Ketika analisis wacana linguistik dengan pendekatan sintaksis digunakan, mengkaji Wacana yang terkait dengan kejahatan dengan satu atau kombinasi metode analisis wacana sintaksis. Seperti disebutkan, setidaknya ada lima metode (Hamad, 2007).



Gambar 1. Kerangka Ilmiah Analisis Wacana untuk Komunikasi Forensik
Sumber : (Hamad, 2007)

Penulis menggunakan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A Van Dijk, mengategorikan wacana terpenuhi jika terdapat tiga dimensi diantaranya adalah: A). Teks, dalam dimensi teks yang diteliti adalah struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk tema tertentu. Teks dapat diperoleh dari hasil menganalisis bagaimana proses wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Dengan melihat dan membaca sebuah teks, kita dapat menemukan makna secara umum. Pada analisis teks, Van Dijk membagi menjadi tiga tingkatan: (1) Struktur Makro, adalah pemaknaan secara global pada suatu teks yang hanya dapat dilihat melalui suatu tema. (2) Superstruktur, ialah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka teori teks serta bagian yang tersusun dalam teks tersebut. (3) Struktur Mikro, yaitu makna wacana yang diamati melalui bagian terkecil dari suatu teks yakni berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, serta gambar. B). Kognisi Sosial Teun A Van Dijk beranggapan bahwa analisis wacana tidak hanya dibatasi oleh struktur teks menandakan pemaknaan, pendapat dan ideologi yang diperoleh dari struktur wacana. Bagi Van Dijk tahapan kognisi sosial inilah yang paling penting, dimana penulis memaparkan sebuah wacana melalui latar belakang kehidupannya. Lebih mudahnya kognisi sosial dikatakan sebagai alasan penulis membuat wacana teks tersebut. Tahapan inilah yang membedakan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dengan tokoh analisis wacana yang lain. 4). Konteks Dimensi yang terakhir adalah konteks sosial. Pada level ini kita dapat menganalisis bagaimana sebuah wacana yang sedang berkembang di masyarakat. Lebih mudahnya kita memahami konteks sosial berhubungan dengan bangunan wacana yang berkembang di masyarakat terhadap wacana tersebut. Memahami sebuah wacana tidak hanya melalui persepsi diri sendiri, namun diperlukan adanya respon atau tanggapan masyarakat mengenai suatu wacana. Analisis komunikasi forensik pada prinsipnya dapat diterapkan pada semua pesan terutama bila mengandung kepentingan tertentu dari pencipta dalam Wacana (huruf besar D) (Haryatmoko, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Model Analisis Politik Fahri Hamzah dalam Forensik Ilmu Komunikasi dan Politik (Sumber: Olahan data penelitian, 2023)

Wacana Politik Fahri Hamzah Sebagai Kerangka Pikir Dasar Kenegaraan (*Philosophische Grondslag*) Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Terapan Ilmu Politik

Wacana Wacana Politik Fahri Hamzah (sebagai *Philosophische Grondslag*), terdiri dari: 1, Konsep Negara (negara kesatuan berbentuk republic), 2.Sistem dan mekanisme Prosedur Bernegara (berciri demokrasi), 3.Landasan Konstitusi (Teori Politik, Hukum dan Konstitusi), 4.Instrument Politik Keterwakilan (wewenang kelembagaan negara), 5.Komunikasi Politik sebagai media aktualisasi ilmu pengetahuan. Dalam praktiknya, komunikasi politik (political communication) merupakan aksioma komunikasi (yaitu bahwa tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi) sehingga komunikasi politik

merupakan konsep komunikasi kontekstual dimana memerlukan analisis dan kajian komunikasi politik. “Komunikasi politik akan berkaitan dengan: (i).Pengaruh; (ii).Kekuasaan; (iii).Kewenangan; (iv).Nilai; (v).Ideologi; (vi).Kebijakan Umum; (vii).Distribusi kekuasaan” yang dikelola dan dirampung menjadi pesan yang disampaikan secara sirkular dari pengirim (komunikator politik) kepada penerima (komunikan), audiens dan/atau khayalak sehingga membentuk gagasan/idea yang merupakan sumber wacana politik yang mempengaruhi opini publik dan/dalam berbagai peristiwa lainnya pada nuansa politik komunikasi (Kustiawan et al., 2022).

Pada aspek gagasan/idea/kerangka pikir yang membentuk wacana, konteks wacana politik yang dikemukakan oleh Fahri Hamzah sebagai upaya mempertahankan eksistensi perpolitikan nasional sebagaimana dikemukakan sebagai berikut, bahwa :

“Memimpin negara ini (Negara Kesatuan Republik Indonesia) haruslah kembali ke sistem bernegara yang berlandaskan Konstitusi dan UUD 1945, dimana dalam menjalankan fungsi kenegaraan harus menggunakan ilmu pengetahuan”.

Wacana politik tersebut tentu berbeda dengan ilmu komunikasi reguler, dimana penempatan kata yang dipindahkan/digunakan akan sangat berbeda cara memahaminya demikian pula literasi pemaknaannya. Dengan demikian “wacana” dalam dimensi komunikasi politik adalah sebagai instrument komunikasi yang pesannya adalah politik sebagai bentuk aspirasi kedaulatan rakyat yang terwakilkan; baik dari partai politik, kelembagaan politik negara (fungsi kelembagaan legislatif) maupun seorang tokoh politik (dimana Fahri Hamzah merupakan tokoh politik). Dimana eksistensi wacana politik itu sendiri adalah merupakan prinsip dasar yang lahir dan timbul dari: 1) Pemikiran; 2) Ujaran; dan 3) Tindakan; yang lahir dari gagasan politik kenegaraan seorang tokoh politik (berdasarkan rumusan Martin Buber, 1878 – 1965) dalam (Bahri, 2009) sehingga menjadi pengertian utama dari implementasi komunikasi politik yang melibatkan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Kurniawati, 2021).

Kaitan dengan wacana politik Fahri Hamzah, berdasarkan pendekatan analisis naratif kualitatif maka secara psikologi teks wacana ini membentuk projektif konten politik (ditelaah dari karya Emile Durkheim yang berjudul Suicider yang mendekati penalaran ilmu sosial pada metode penelitian *positivistic* yaitu konsep pemikiran berdasarkan aspek validitas dan aspek prediksi) (Rizal Syahputra & Xaverius Sri Sadewo, 2021), bahwa wacana politik seorang tokoh publik/politik Fahri Hamzah merupakan pengembangan konsep pikir/idea/gagasan atau disebut *predictive validity*, yaitu derajat kemampuan berpikir dari pengukuran dengan peristiwa yang akan datang dalam hal ini adalah peristiwa dari dimensi politik kenegaraan dan reformasi pemerintahan. Dengan demikian pokok piker/idea/gagasan ini membentuk “wacana” sebagai *construct validity* atau disebut derajat kemampuan berpikir akan pengukuran dari kesinambungan gagasan politik komunikasi dengan peristiwa yang diprediksi pada masa yang akan datang (Firmansyah et al., 2023).

Berdasarkan konten wacana politik Fahri Hamzah dengan metode pendekatan naratif kualitatif analitis maka adapun makna filosofi (pokok pikir *Philosophische Grondslag*) yang terkandung dalam serapan konten wacana dari bentuk komunikasi politik tersebut, hemat penulis sebagai berikut: Konsep Negara (Negara Kesatuan Berbentuk Republik), Sistem Kenegaraan (Negara Hukum Berciri Democracy System), Landasan Konstitusi (Hukum dan Konstitusi berkembang berdasarkan alur reformasi dan tuntunan Politik sebagai dasar teori konstruksi sosial), Instrument Politik Keterwakilan (Wewenang Kelembagaan Negara) dan Komunikasi Politik Sebagai Media Aktualisasi Ilmu Pengetahuan (Rahmayani et al., 2022).

Fahri Hamzah pada akhirnya mengambil langkah dalam membuat partai baru untuk menjawab keresahan yang terjadi sebagai contoh untuk pertanyaan tentang konflik ideologi yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena Indonesia telah lahir secara sempurna karena dalam kelahirannya sudah ada pemimpin, negara dan birokrasinya juga mengandung nilai-nilai dan falsafahnya. Bahkan falsafah pancasila itu telah ada sejak lahir. Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 18 Agustus 1945 para founding fathers menyetujui undang-undang dasar dan batang tubuh pembukaannya dan terdapat pancasila

lalu, dalam batang tubuhnya termaktub konstitusi negara yang berlaku. Seharusnya dalam kesempurnaan kelahiran setiap rakyat di negara ini tidak perlu lagi adanya konflik karena *Philosophische grondslag*-nya (Monitasari et al., 2021). Jadi sebenarnya, hal yang paling elementer yang harus disadari setiap rakyat adalah terlahir sebagai warga di negara ini secara sempurna jika masih ada lagi pertanyaan maka yang di perlukan adalah menawarkan thesis tentang bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai kekuatan dunia dan kekuatan besar yang tidak saja menciptakan kesejahteraan dan perdamaian didalam negeri tetapi ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam tujuan negara pembukaan UUD 1945 sehingga negara ini punya sesuatu yang baru yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Maka wacana dalam Komunikasi politik dapat dipahami sebagai komunikasi konstektual formal karena sifatnya adalah merupakan komunikasi yang terjadi di lembaga resmi atau formal dengan diantaranya melibatkan elit tokoh politik kenegaraan, sehingga wacana politik sebagai bentuk upaya komunikasi verifikasi/validity issue akan *idea/gagasan/pokok pikir* kenegeraan secara vertical dan horizontal. Dimana komunikasi politik merupakan/dan/atau melibatkan lapangan wewenang kelembagaan publik, sebagai bentuk sarana kewenangan mengontrol kebijakan umum (*basic democracy system* dalam mekanisme sistem perpolitikan), melibatkan khayalak umum (diantaranya seperti media massa) karena tuntutan politik sebagai bentuk kedaulatan rakyat, badan informasi pemerintah (karena sumber informasi dan issue dikuasai lebih banyak oleh pemerintah secara implemmentasi), tokoh politik dan/atau partai politik (sebagai bentuk tanggung jawab kenegeraan dari sarana para pemikir akan statute kenegeraan dalam *politic system*). Secara analogi wacana dalam perpektif komunikasi politik merupakan design urgensif dari komunikasi formal; karena memerlukan dasar filosofi kerangka berpikir dalam issue yang perlu dikritisi bersifat “a postereore” dan tuntutan akan langkah konkrit dari sikap politik kenegeraan disisi lain bersifat “a priore”. Hal ini sejalan dengan ilmu komunikasi dan politik sebagai bentuk dari cabang ilmu terapan (Rusmulyadi & Hafiar, 2018).

Analisa Gagasan Wacana Politik Fahri Hamzah Dalam Forensik Ilmu Komunikasi Terhadap Implementasi Sistem Perpolitikan Indonesia

Pada Ilmu Komunikasi dan Sistem Politik, oleh David Easton menjelaskan bahwa politik menitikberatkan pada aspek proses dimana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku (sikap politik) yang mempengaruhi alur/seni komunikasi, sehingga “*authoritative allocation of values* – alokasi nilai-nilai secara otoritatif/sah/sesuai dengan kewenangan” yang secara dimensi politik pada hakekatnya melekat dengan “kekuasaan dan upaya memegang/menjalankan kekuasaan tersebut”. Dengan demikian, ilmu komunikasi adalah bentuk seni ilmu dalam upaya mengontrol dan/juga/turut serta dalam pengelolaan tanggungjawab kekuasaan tersebut dalam rangka pengambilan kebijakan publik (dimana kebijakan publik sebagai produk kajian dari studi ilmu komunikasi dan politik). Sehingga diperlukan seni komunikasi/ketrampilan komunikasi baik secara *predictive validity* (kualitias prediksi dari orientasi kebijakan publik sebagai hasil produk politik) maupun *construct validity* (konstruksi berpikir dalam gagasan penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan “wacana” sebagai alat ilmiah untuk membedah konstruksi penyelenggaraan kekuasaan dalam rangka mengambil/membuat kebijakan publik sebagai bagian dari produk dan proses politik) yang dibahas secara “forensik ilmu komunikasi analitis”(Adi Wibowo, 2013).

Dengan demikian untuk menggali dan menganalisa pokok pikir/Idea/gagasan dari wacana politik Fahri Hamzah kedalam interpertasi prinsip ilmu komunikasi dan politik, yaitu bahwa wacana politik:

“Memimpin negara ini (Negara Kesatuan Republik Indonesia) haruslah kembali ke sistem bernegara yang berlandaskan Konstitusi dan UUD 1945, dimana dalam menjalankan fungsi kenegeraan harus menggunakan ilmu pengetahuan”

Maka peneliti menggunakan penalaran forensik ilmu komunikasi analitis dalam membedah wacana dikmaksud kedalam sumber ilmu pengetahuan yaitu sebagai kerangka pikir filosofi komunikasi politik (bahwa wacana politik tersebut sebagai kerangka *Philosophische Grondslag*) dalam upaya mempertahankan eksistensi Sistem Perpolitikan Indonesia.

Dengan menggunakan forensik komunikasi Dilihat dari ilmu forensik komunikasi baik tulisan, verbal maupun non verbal ada pesan dibalik makna interpretasi kebenaran wacana politiknya Fahri Hamzah. Fahri Hamzah menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia politik dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat realitas tentang negara. Khalayak dapat menilai wacana Fahri Hamzah sebagai bentuk dari tindakan. Fahri Hamzah menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat realitas tentang negara. Media sosial, seperti YouTube banyak digunakan pejabat sebagai media untuk menyampaikan pesan dan pendapat kepada khalayak. khalayak pun bisa menilai persepsi seorang pejabat melalui tampilannya di media sosial, seperti YouTube.

Fahri Hamzah memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat dengan mendidik juga menekankan bahwa kita sebagai manusia politik pasti punya tujuan pragmatis tetapi jangan juga menggunakan itu sebagai alat sehingga kita mengabaikan hal-hal yang sangat elementer sebagai seorang politisi yang menggunakan suara rakyat (Firmansyah et al., 2023). Karena bangsa ini memerlukan pikiran Dengan cara-cara yang baik tanpa perlu melakukan effort luar biasa *automatically* ingatan yang baik akan tinggal dalam benak rakyat tanpa perlu mengupayakan eksistensi yang berlebihan apalagi dewasa ini media akan dengan senang hati mempromosikan apa yang dianggap baik dan hal itu berlaku sebaliknya. Justru pencitraan diri yang berlebihan akan mengakibatkan pem-bully-an dan menjadi tidak efektif. Ilmu pengetahuanlah yang akan menjadi sumber dari popularitas karena ilmu itu akan abadi kita sendiri tau berapa banya ilmuwan bahkan ribuan tahun lalu namanya abadi karena yang ditinggalkan adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai kekuatan naratif. Dan mengabaikan pendapat penerimaan orang lain terhadap wacana yang dibuat karena Fahri Hamzah. Karena Fahri Hamzah merasa bahwa problem negara ini adalah yang sudah selesai dianggap belum selesai dan berkuat pada masalah-masalah yang tidak penting karena sebenarnya masalah kita sebagai bangsa ini sudah selesai dan tertuang dalam UUD 1945 dan mengabaikan hal-hal lainnya atau yang lebih buruk membuat masalah baru yang tidak konstruktif (Kurniawati, 2021).

Demokrasi sendiri dimaknai dengan alam pikiran. Dengan menyatakan diri pindah ke negara demokrasi, bangsa demokrasi, masyarakat demokrasi, dan pemerintahan demokrasi itu artinya kita mengisi hari-hari dengan meng-exercise pikiran-pikiran. Sedangkan masyarakat otoriter dan totaliter rakyat tidak diperbolehkan berbicara tentang politik karena politik adalah urusan segelintir orang (Rahman et al., 2019). Sayangnya, sekarang ini masyarakat atau Lembaga banyak mempertanyakan apa yang terjadi dengan demokrasi, apa yang terjadi dengan bangsa dan apa yang terjadi dengan pemilu karena tidak mendapatkan porsi yang memadai sehingga terlihat seperti *it goes by itself* tanpa proses dialektika yang mempertanyakan keadaan (negara) ini. Inilah yang menyebabkan proses politik menjadi kurang bermakna dan tawar. Inilah *basic problem* yang hilang di negara ini. Juga matinya oposisi parlemen dan kurang dilacak dari sebab-sebab yang secara sistemik memang diciptakan situasi ini. Sehingga parlemen tidak bicara tentang alternative kebijakan, alternative narrative, dan lain sebagainya termasuk dalam pemilu proses tersebut tidak diperdulikan soal bagaimana menciptakan iklim orang-orang terbaik yang masuk dalam kontestasi bahkan tidak menjawab jebakan tentang money politic secara massif juga diperparah dengan keyakinan di negara ini bahwa manusia politik tidak dipilih karena pikiran tetapi karena logistic dan rakyat menikmati suguhan ini.

Sebab-sebab secara sistemik yang disebabkan oleh para pemimpin maka krisis yang dihadapi menjd 3 bagian: Pertama krisis global, kedua Krisis kelembagaan institut termasuk partai politik dan ada kegalauan narrative di tingkat elite dan, ketiga Krisis manusia. Teori dalam negara demokrasi partai politik adalah lembaga intelektual pendirinya adalah pemilik ideologi /pemikir kelasnya Marxisme, Leninisme. Di indonesia tokoh nasionalis besar bung Karno mendirikan partai nasionalis, Natsir seorang

idolog islam mendirikan masyumi, Syahrir seorang sosialis mendirikan PSI dan bung Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam. Dalam kurun waktu 25 tahun belakangan ini Partai politik yang harusnya menjadi the business of great intellectual tetapi dalam negara ini, pedagang yang mendirikan partai atau partai yang ada, tergerus nilainya oleh pedagang. Tidak meng-address persoalan secara rasional dan hanya menjadi simbolik. Persoalan negara banyak di operate di belakang layar. Dari cara-cara seperti itu, maka cita-cita bangsa sampai kapanpun tidak akan terwujud dan rakyat tidak akan melihat bangsa besar yg kuat, maju dan modern kalau tidak ada keberanian memimpin bangsa ini secara rasional. Akhirnya pemikiran menjadi tidak penting. Dan kalau voters menganggap pikiran tidak penting negara akan kembali ke sistem kerajaan dimana kepemimpinan itu it's not a pure product dari pikiran tetapi product dari hal-hal yang paling kasar, contoh; darah dan keturunan atau senjata di tangan tiran dan harus segera dihentikan karena dengan sadar jika segenap stockholder berupaya, bangsa ini diatur oleh pikiran namun, para elite-nya tidak mau meng-entertain pikiran dan meng-entertain gimmick-gimick sehingga minim produksi ide juga gagasan.

Konsep ilmu pengetahuan dalam kepemimpinan sudah sebenarnya dikembangkan pada zaman Yunani kuno, Plato mengajukan pemikiran Filsuf raja yaitu seorang penguasa yang merupakan ahli filsafat. Ia mengajukan konsep ini di buku Republik-nya, dan menurut Plato, pemerintahan yang ideal seharusnya dipegang seorang filsuf raja. Dengan ilmu filsafatnya, filsuf raja ini diharapkan memiliki moral yang baik dan tidak mudah terkena godaan, serta dengan pengetahuannya dapat membantu dan memperbaiki kehidupan masyarakat yang ia perintah. Setelah dibawakan Plato, konsep ini mempengaruhi cara pemerintahan Kekaisaran Romawi dan beberapa monarki Eropa yang dikenal dengan istilah absolutisme tercerahkan. Ide ini juga dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis bahwa filsuf raja ini juga haruslah orang yang saleh dan taat beragama. Konsep ini juga mempengaruhi Ayatollah Khomeini dan konsep pemerintahan yang ia pelopori di Republik Islam Iran.

Mengajukan ilmu pengetahuan dan pemikiran sebagai dasar maka 3 rute dalam pemilihan seorang pemimpin bisa di urai sebagai berikut: Pertama, Rute perbincangan atau debat naratif, Dalam 3 proses pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah, calon Legislatif, calon Presiden, calon Gubernur, calon Bupati harusnya diberi waktu yang agak lama untuk mendiskusikan apa yang terjadi, apa masalahnya dan memberikan solusi sebagai visi misi pada pencalonannya. Kedua, memaparkan program Berkaitan dengan penyelesaian masalah yang dihadapi di tiap-tiap daerah. Dan Ketiga, Memilih Pemimpin Dengan diskusi, debat akan terpilih siapa orangnya dan siapa yang tepat mampu memikul narasi dan program yang diusung dan dipilih secara lebih rasional.

Dengan mengijinkan politisi yang salah berkuasa tanpa rasionalitas dan pemikiran maka, rakyat akan menjadi korban setiap proses politik karena pikiran tidak sempat di elaborasi sebagai bentuk memamerkan yang tajam dari runcingnya perpecahan dan perbedaan diantara rakyat sehingga pilihannya juga tidak rasional. Dengan menggunakan rasionalitas yang didalamnya ada pertarungan ide, ilmu, gagasan bisa memberi kesempatan banyak orang untuk mengurai tajam dan runcingnya perbedaan sehingga meminimalisir pertengkaran didalam masyarakat karena pemilihnya tidak rasional. Semakin pikiran tidak dipakai maka yang dipakai adalah interaksi dan label-label identitas dan ujungnya adalah kalau kebosanan itu memuncak yang bisa memimpin negara bukan pikiran lagi tetapi adalah alat kekerasan yang dapat dibuktikan dengan sejarah kudeta di mana-mana. Begitulah contoh jika tidak ada pikiran yang bertemu sehingga yang digunakan adalah kekerasan dan kekuatan karena dirasa kekuatan itu yang paling efektif dan bukan Logika atau logika kekuatan.

Realitas sosial dan dunia politik adalah Pencitraan

Certain crisis mencakup tiga hal Pertama, Interpretasi terhadap narasi-narasi ideal kita melemah karena kebebasan yang semakin menurun. Indeks demokrasi dimata dunia mengalami penurunan sehingga interpretasi terhadap nilai-nilai ideal dalam konstitusi tidak bebas. Kedua, Kapasitas negara yang kurang memadai banyak faktor sehingga menghadapi masalah korupsi, masalah terorisme dan narkoba yang merajalela dan banyak lagi soal-soal lain yang berulang-ulang dari lemahnya kapasitas negara. Ketiga, Lemahnya kualitas kepemimpinan akibat partai politik tidak

memproduksi pemikir. Partai politik tidak mau memproduksi pemimpin-pemimpin yang idealis dan semakin memproduksi orang-orang pragmatis dan pedagang (Yuanita, 2021).

Negara memberikan seluas-luasnya pemikiran demokrasi yang secara terbuka dan mengembangkannya. Kapasitas negara bisa juga tidak berkembang karena faktor ketiga yaitu; orang-orang yang memimpin kelasnya menurun jadi seharusnya, dalam memandang hasil reformasi 98 setelah masuk seperempat abad reformasi maka transformasi narasinya ada dalam amandemen konsitusi empat kali yang menghasilkan lahirnya pemerintahan yang semakin otonom, semakin terbuka dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dan lahir pemimpin dari berbagai kalangan banyak orang yang berasal dari latar yang begitu beragam.

Reform yang harus dilakukan yang terjadi di negara ini ada jarak antara rakyat dan para pejabat dengan masalah yang terjadi disekitar. Demokrasi menciptakan orang yang masuk ke dalam negara, tetapi elite-nya meninggalkan rakyat dan rakyat semakin tidak punya akses untuk mengintervensi apa yang terjadi dan para pejabatnya bersembunyi di dalam struktur negara/tidak turun kepada rakyat. Dokumen Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka tunggal Ika dan naskah-naskah dasar tidak ada salahnya dan tidak ada argumen tentang Pancasila karena sudah final. Berbeda dengan Konsitusi, layak untuk diamandemen dan independensi peradilan, memperkuat kamar legislatif yaitu DPD sehingga fungsinya sama dengan DPR dan menyempurnakan presidensialisme agar pertanggungjawaban presiden lebih riil. Dewasa ini, ada kesan presiden seperti tidak dipaksa untuk bertanggung jawab, seolah-olah menjadi tugas dari kementerian saja padahal leadership harus diutamakan dan belum terciptanya mekanisme penyempurnaan terhadap presidensialisme.

Dalam Negara memang dipandang Konsitusi, konsep negara dan struktur negara susah dirubah tetapi ada solusi yang secara reguler bisa diubah yaitu kepemimpinan figur-figur politisi yang berkuasa. Demokrasi di ijinakan untuk setiap 5 tahun bisa mengukudeta politisi atau diganti dengan orang lain dan itulah harapan bagi rakyat. Ada hope maka menyiapkan proses regenerasi atau proses pergantian kepemimpinan secara damai juga rutin dilakukan. Itulah bisnis dari suatu negara yang paling penting karena ada harapan untuk sirkulasi elite. Sebelum Indonesia merdeka yang dengan feodalisme system pemimpin tidak bisa diganti sampai raja tersebut mangkat tetapi sekarang ada proses Pemilu yang baik sehingga dibentuk partai politik bukan legion pertempuran karena satu-satunya cara mengganti kepemimpinan adalah melalui Pemilu.

Realitas sosial banyak diabaikan bahkan menganggap masalah-masalah yang cukup sepele menjadi besar. Kita adalah bangsa hebat jika pemimpin kita memiliki ilmu pengetahuan yang mendrive bangsa ini. Karena jika kemampuan pemimpin rendah maka ia akan melayani dengan cara-cara rendah tetapi jika pemimpin punya ilmu pengetahuan yang cukup maka ia akan menganggapi ide-ide demokrasi dan ide-ide konstitualisme yang ideal. Karena cita rasa pemimpin kita sedang tawar-tawarnya.

Hal penting dalam dunia politik adalah pencitraan. Tentu hal ini kemudian menjadi hal yang lumrah, bukan suatu dosa dalam dunia politik. Immanuel Kant, seorang tokoh filsafat idealisme pernah memberikan masukan bahwa jika seseorang telah terjun ke dalam dunia politik, maka berpolitiklah secara cerdas seperti seekor ular, namun juga mesti tulus dari hati dalam menjalankan roda politik setulus burung merpati. Sehingga kemudian, niat untuk terjun ke dunia politik bukan semata-mata karena mengejar kekuasaan dan prestige namun juga karena ada niat tulus untuk bisa maju Bersama-sama.

SIMPULAN

Penyampaian wacana politik tak pernah lepas dari adanya maksud tertentu dari penyampai wacana. Selalu ada makna yang tersimpan dalam setiap kalimat yang disampaikan. Pada kajian sisi superstruktur teks, dapat disimpulkan bahwa wacana politik Fahri hamzah tersusun baik dengan memberikan latar belakang terciptanya wacana. Elemen terakhir dari kajian analisa wacana kritis oleh van Dijk adalah struktur mikro atau semantik. Wacana politik Fahri Hamzah terdiri dari elemen latar, detail, praanggapan dan nominalisasi pada bagian semantik. Penggunaan kata ganti, dan bentuk

kalimat yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat aktif, beberapa kalimat persuasif serta cenderung menggunakan aspek koherensi kondisional. Fahri Hamzah juga cenderung menggunakan diksi dengan stilistik/*style* yang mengarah kepada penggunaan bahasa untuk memberikan pandangan atas negara dan terakhir penggunaan elemen retorik dengan memberikan majas sindiran.

Motif dibalik tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Fahri Hamzah kita bisa mengujinya melalui forensik komunikasi dengan pengaplikasian teori makna dapat diambil kesimpulan wacana politik Fahri hamzah adalah murni untuk pembelajaran politik demi kesehatan demokrasi kedepan. Sehingga orientasi politiknya dari seorang politisi menuju kepada seorang negarawan yang murni hanya mementingkan kepentingan bangsa dan negara sehingga tidak terjadi *social distrust* kepada pemimpin yang akan datang yang sedang bergejolak di beberapa negara belakangan ini. Masyarakat dapat menilai wacana tuturan dalam berbagai media Fahri Hamzah sebagai bentuk dari tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wibowo, S. K. (2013). Komunikasi Forensik : Keahlian Yang Asing Dalam Pengadilan. *Jurnal Sosioteknologi*, 12(29), 377–383. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.2>
- Bahri, S. (2009). Eufemisme Dalam Wacana Politik. *Jurnal Bahas*, 18(02). [http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/bahas/article/view/2476%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/490/1/Eufemisme dalam wacana politik.pdf%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/490/](http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/bahas/article/view/2476%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/490/1/Eufemisme%20dalam%20wacana%20politik.pdf%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/490/)
- Firmansyah, J., Apriansyah, A., & Leriska, N. T. (2023). KOMUNIKASI POLITIK DAN CITRA PARTAI (STUDI PADA PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA) PENDAHULUAN Kehadiran partai politik merupakan perwujudan dari hadirnya sarana komunikasi antara masyarakat dan negara . Partai politik menjadi wadah as. *Jurnal Trias Politika*, 7(1), 61–75.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa : sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. granit.
- Hamad, I. (2007). Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 325–344. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1252>
- Hartinah, Y., & Kindi, F. M. (2020). Analisis Wacana Politik Capres Joko Widodo Dan Prabowo Subianto Dalam Debat Pilpres 2019. *PRASASTI: Journal of Linguistics*, 5(1), 105. <https://doi.org/10.20961/prasasti.v5i1.39387>
- Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Rajagrafindo Persada.
- Iskandar, F. (2020). Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.177>
- Jannatania, J., Wibowo, S. K. A., Rohayati, H. S. M., Hidayat, D. R., & Indriani, S. S. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel Culture) Di Indonesia. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.7690>
- Kurniawati, A. (2021). Communication and Political Conflict Resolution of the Prosperous Justice Party in Handling the Case of Fahri Hamzah. *Propaganda*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.37010/prop.v1i1.253>
- Kustiawan, W., Fauzi, A., Haqqi, D., Saripuddin, M., Imam, R. K., & Puspita, R. (2022). Karakteristik dalam Komunikasi Politik Mengemas Pesan Politik. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 2017–2024. <https://ummaspul.ejournal.id/JKM/article/download/3778/1347>
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Demokrasi dalam Dimensi Nilai-nilai Pancasila berdasarkan Paradigma Philosophosche Grondslag. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 232–245.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (9th ed.). PT Remaja Rosdakarya. <https://rosda.co.id/pendidikan-keguruan/713->

- metodologi-penelitian-kualitatif-paradigma-baru-ilmu-komunikasi-dan-ilmu-sosial-lainnya.html
- Prajarto, N. (2010). *Komunikasi Politik dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*. 1–69. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SKOM431903-M1.pdf>
- Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *PROfesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721>
- Rahman, F. A., Rouf, M. F., Asyahidda, F. N., & Hufad, A. (2019). Bias Politik Dibalik Sebuah Media : Relevansi Sosialisasi Politik Di Indonesia. *Sosietas*, 8(2), 553–561. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14599>
- Rahmayani, D., Aifha, N., Nulfadli, I., & Santoso, G. (2022). Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag, Weltanschauung) Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 51–67.
- Rahmi. (2019). Kebebasan Pers Dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 6(1), 41–57. <http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/194>
- Rizal Syahputra, M., & Xaverius Sri Sadewo, F. (2021). Konstruksi Diri Pelaku Bunuh Diri Yang Gagal, Dalam Memaknai Kehidupan Dan Kematian. *E-Journal UNESA*.
- Rusmulyadi, R., & Hafiar, H. (2018). Dekonstruksi Citra Politik Jokowi Dalam Media Sosial. *PROfesi Humas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 3(1), 120. <https://doi.org/10.24198/prh.v3i1.16729>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 379–398. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>
- Yuanita, D. (2021). Peran key opinion leader dalam strategi public relations pada komunikasi krisis perusahaan. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i1.29693>